



9 Siswa Disabilitas Pilih Sekolah Swasta

■ Disdikpora Tak Membatasi Waktu Pengambilan Berkas Pendaftaran

YOGYA, TRIBUN - Sembilan dari 39 anak berkebutuhan khusus yang gagal masuk SMP negeri di Kota Yogyakarta sudah mengambil berkas pendaftaran untuk masuk ke sekolah swasta. Mereka akan disalurkan menuju sekolah swasta yang bekerja sama dengan Disdikpora Kota Yogya, selaras dengan keinginan siswa.

Sebelumnya, sebanyak 39 anak berkebutuhan khusus gagal masuk SMP negeri di Kota Yogyakarta setelah terpengal dari proses Penyerahan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi disabilitas. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta pun bergerak cepat dengan menyiapkan sejumlah sekolah swasta untuk menampung anak-anak difabel itu.

"Jadi, mereka sudah mengambil berkas ke ULD (Unit Layanan Disabilitas), kemudian kami berikan ke (sekolah) swasta yang mereka pilih," kata Kepala UPT Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kota Yogyakarta, Aris Widodo, Selasa (9/7).

Deretan sekolah tersebut antara lain, SMP Muhammadiyah 9, SMP Muhammadiyah 10, SMP Muhammadiyah 7, SMP Muhammadiyah 1, SMP Perintis, SMP Taman Dewasa Taman Siswa, dan SMP Taman Dewasa Jettis. Dua sekolah yang turut mengusulkan untuk menerima para siswa difabel itu, yakni SMP Perak dan SMP Piri 2 Yogyakarta.

"Kalau memilih sekolah itu, siswa akan mendapat Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), besarnya Rp4 juta per tahun. Rp1 juta untuk pribadi kebutuhan siswa, lalu yang Rp3 juta untuk biaya operasional sekolah selama setahun," jelasnya.

Namun, ketika yang bersangkutan memilih sekolah dengan biaya operasional di atas ketetapan JPD, maka menjadi beban atau tanggungjawabnya sendiri. Palsalnya, lanjut Aris, kekuatan APBD yang digelontorkan dari APBD Kota Yogyakarta maksimal hanya Rp4 juta per tahun untuk masing-masing siswa difabel.

"Karena (biaya operasional) sekolah kan bervariasi. Ada sekolah yang murah, terus yang favorit pasti biayanya tinggi. Nah, itu mereka tanggungjawab sendiri, karena plafonnya JPD hanya Rp4 juta," ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa Disdikpora tidak membatasi waktu pengambilan berkas bagi 39 calon siswa yang terpengal dari PPDB SMP jalur afirmasi disabilitas, untuk mengakses deretan sekolah swasta itu. Menurutnya, pemerintah siap memfasilitasi

mereka sampai mendapat sekolah, sekaligus memperoleh akses pendidikan yang benar-benar layak.

"Kami tidak membatasi, kami layanan sampai dapat sekolah. Sebenarnya, para siswa disabilitas yang tidak diterima di sekolah negeri itu kepastian mendapat sekolahnya, bukan masalah

LANJUTKAN PENDIDIKAN

- Sembilan dari 39 anak difabel sudah mengambil berkas pendaftaran untuk masuk ke sekolah swasta.
- Sebelumnya, mereka gagal masuk SMP negeri karena terpengal dari proses PPDB jalur afirmasi disabilitas.
- Di sekolah swasta, mereka akan mendapat Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) sebesar Rp4 juta per tahun.

ke swasta atau negerinya," ujarnya.

Aris pun tidak memahaminya alasan 30 jebolan PPDB SMP jalur afirmasi disabilitas lainnya yang belum melakukan pengambilan berkas untuk mengakses sekolah swasta. Meski demikian, pihaknya tidak akan menepuh upaya jempot bola, karena ada kemungkinan mereka memilih sekolah lain yang tidak bekerja sama dengan Disdikpora Kota Yogya.

"Mungkin mereka sudah dapat sekolah, bisa jadi seperti itu, karena ada yang mau kami salurkan, tapi ternyata sudah daftar ke (SMP) Muhammadiyah 2. Padahal, itu bukan yang mengajukan diri, tapi daftar zonasi dan diterima di sana, ada yang seperti itu. Jadi, tidak harus lewat kami," imbuh Aris.

Bukan pilihan buruk Ketua LSM Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi), Yuliani Putri Sunardi mengatakan, sekolah swasta bukanlah pilihan buruk bagi mereka yang tidak diterima di sekolah negeri. Apalagi, para siswa disabilitas yang tidak diterima di sekolah negeri menerima dana subsidi Rp4

juta selama satu tahun.

"Setahun disubsidi Rp4 juta itu saya kira lebih dari cukup. Itu belum ditambah BOSDa yang mungkin hanya 50 persen dari sekitar Rp 1,1-1,2 juta dan juga BOS. Mereka yang di sekolah swasta itu bisa mendapat bantuan lebih dari cukup ditambah mereka yang ada di sekolah negeri," beber Yuliani.

Meski begitu, kata Yuliani, sekolah swasta harus memastikan mereka tidak mendapat biaya tambahan sepeserpun dari siswa difabel ini. Yuliani juga berharap para siswa difabel tidak menganggap dirinya dibuang ketika sekolah di sekolah swasta. Peraturan itu, ditegaskannya sekali lagi, menjadi alternatif agar para siswa difabel dan keluarga bisa meminimalisasi segala potensi risiko, jika siswa justru diterima di sekolah yang cukup jauh.

"Diberikan pemahaman saja. Sekolah di swasta juga bisa berprestasi. Kalupun misalnya dipisahkan di satu sekolah dimana si siswa saja nilainya sudah tidak mencukupi, takutnya nanti malah tertekan," terangnya. (ard/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005